JURNAL MSDM
Manajemen Sumber Daya Manusia
ISSN : 3063- 4857
Vol. 2, No. 1, 2025

PENGARUH TINGKAT MELEK POLITIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

Khairunnisa[1], Jumaidi[2] , Moh. Fajar Noorahman[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail:khairunnisa.nisa224@gmail.com

ABSTRAK

"Tingkat literasi politik terhadap partisipasi pemilih pemula merupakan salah satu aspek penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Pemilih pemula umumnya mereka yang berusia 17-21 tahun, memiliki peran yang strategis karena jumlah mereka yang cukup banyak dan masih baru dalam pemilu. Namun, kesadaran dan pengetahuan mereka tentang politik seringkali masih minim, pemilih pemula juga biasanya mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi politik. Banyak pemilih pemula yang memilih berdasarkan arahan atau tekanan dari keluarga atau lingkungan sosialnya, tanpa mengevaluasi calon atau isu politik itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat melek politik terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pemilukada, serta sejauh mana pengaruhnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, dan dokumen. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA se-Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Amuntai Tengah yang berjumlah 93 orang. Setelah data terkumpul, dilakukan uji coba melalui Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, kemudian dilakukan analisis data melalui Uji Normalitas, Reliabilitas, Uji Korelasi Product Moment, Uji T Parsial, dan Uji Koefisien Determinasi untuk memperoleh hasil yang signifikan dari variabel Tingkat Literasi Politik terhadap Partisipasi Masyarakat. Hasil penelitian berada pada kategori rendah, nilai korelasi sebesar 0,378 sehingga koefisien determinasi (R^2) sebesar 14,3%. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh variabel X sebesar 14,3% terhadap variabel Y, sisanya sebesar 85,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Tingkat partisipasi pemilih pemula akan semakin tinggi apabila pemerintah dan lembaga pendidikan meningkatkan upaya dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, dan pemanfaatan media massa perlu dimaksimalkan untuk menyebarluaskan informasi politik yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula".

Kata Kunci:. Tingkat Melek Politik, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

"The level of political literacy towards the participation of novice voters is one of the important aspects in building a healthy democracy. Novice voters are generally those aged 17-21 years, have a strategic role because their significant number is fresh in the election. However, their awareness and knowledge of politics are often still minimal, novice voters also usually rely on social media as a source of political information. Many novice voters vote based on direction or pressure from their family or social environment, without evaluating the candidates or political issues themselves. This study uses a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, and documents. The sample in this study was 93 12th grade students at senior high schools in Hulu Sungai Utara Regency, Amuntai Tengah District. After the data was collected, a trial was conducted through the Validity Test and Reliability Test, then data analysis was carried out through the Normality Test, Reliability, Product Moment Correlation Test, Partial T

Test, and Determination Coefficient Test to obtain significant results from the Political Literacy Level variable on community participation. The results of the study are in the low category, the correlation value is 0.378 so that the coefficient of determination (R^2) is 14.3%. The conclusion is that there is an influence of variable X of 14.3% on variable Y, the remaining 85.7% is influenced by other variables. The participation rate of new voters will be higher if the government and educational institutions increase efforts in providing political education to new voters, and the use of mass media needs to be maximized to disseminate political information that can increase political understanding and awareness among new voters".

Keywords:. *Tingkat Melek Politik, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Salah satu alat utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik adalah pemilihan umum kepala daerah, yang juga dikenal sebagai pemilukada. Pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya memainkan peran strategis yang signifikan dalam situasi ini. Secara umum diyakini bahwa anak muda yang baru pertama kali memberikan suara membawa vitalitas dan ide-ide segar dalam proses politik. Salah satu dari sekian banyak elemen yang mempengaruhi kemungkinan mereka untuk memilih dalam pemilihan umum daerah adalah seberapa baik informasi yang mereka miliki tentang politik.

Pemilu juga dikenal sebagai pesta rakyat atau pesta demokrasi. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, pemilih memiliki suara langsung untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota, atau anggota legislatif mereka dalam pemilu, terutama pemilu yang diselenggarakan pada masa sekarang. Mekanisme pemungutan suara di tempat pemungutan suara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari para kandidat dan memilih yang terbaik di antara mereka. Selain itu, para kandidat yang mencalonkan diri dan berpartisipasi dalam pasar pemilu ini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui berbagai cara yang sah, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan mendapat dukungan dari masyarakat pemilih. Adalah hak setiap warga negara Republik Indonesia yang taat hukum untuk memilih dan dipilih. Hal ini memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang ras, agama, golongan, atau etnis, memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan menduduki jabatan publik. Setiap orang memiliki hak yang sama di bawah hukum. Ini adalah dua alasan utama mengapa pemilu dikenal sebagai pesta demokrasi rakyat.

Semua orang berharap bahwa pemilu akan diselenggarakan dengan cara yang adil dan jujur. Seharusnya tidak ada gangguan terhadap kegiatan sehari-hari bangsa dan negara selama pelaksanaan pemilu, yang kita semua lihat sebagai ajang pergantian kepemimpinan. Namun, membangun prinsip-prinsip ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengingat budaya politik masyarakat Indonesia yang masih bercorak semi-parokial, ada kebutuhan berkelanjutan untuk membangun pemilu yang jujur dan adil. Melihat pemilu di Amerika, kita dapat melihat bahwa negara ini memiliki tingkat golput yang sangat rendah, yang mengindikasikan tingkat kesadaran politik masyarakat yang tinggi. Kesadaran ini tidak hanya ditunjukkan oleh orang-orang yang memberikan suara, tetapi juga oleh partisipasi mereka yang intens dalam proses politik di negara mereka. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana keterlibatan politik masyarakat di negara maju telah

membawa perubahan yang signifikan, seperti terbentuknya sistem politik yang demokratis, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan penting bagi kemajuan bangsa.

Apa yang terjadi di negara-negara maju, seperti Indonesia dan bahkan beberapa negara Asia lainnya, memiliki korelasi negatif dengan isu ini. Budaya politik semi-parokial mendefinisikan Indonesia sebagai negara berkembang. Budaya politik semi-parokial ditandai dengan kurangnya minat dan partisipasi dalam proses politik formal seperti pemungutan suara atau perumusan kebijakan. Kalaupun ada, fungsinya sangat terbatas pada kelompok demografis tertentu; hanya dalam bentuk memberikan suara dalam pemilu, itupun hanya karena paksaan dan kewajiban, bukan kesadaran. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sangat kurang dalam proses politik lainnya.

Secara luas dianggap bahwa memiliki pemahaman yang kuat tentang politik membuat orang menjadi pemilih yang lebih terlibat dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas keterlibatan politik. Di sisi lain, orang-orang yang tidak melek politik mungkin tidak peduli dengan pemilu, tidak mau memilih, atau membuat pilihan yang tidak logis.

Karena dampak dari media sosial dan teknologi informasi, masalah mengajak lebih banyak orang untuk memilih untuk pertama kalinya menjadi lebih rumit di Indonesia. Banyak anak muda yang mendapatkan berita politik dari media sosial, namun sayangnya, seringkali apa yang mereka baca adalah berita yang tidak benar, palsu, atau tidak jelas.

Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, keakraban pemilih pemula dengan proses pemilu, struktur pemerintahan, dan kandidat yang mencalonkan diri mempengaruhi tingkat literasi politik mereka. Remaja yang baru saja berusia 18 tahun dan memenuhi syarat untuk memilih merupakan mayoritas pemilih pemula di daerah tersebut, dan mereka sering kali masih belajar tentang politik. Sumber utama pengetahuan mereka meliputi pelajaran di kelas, laporan berita, media sosial, dan informasi dari mulut ke mulut di dalam komunitas dan keluarga mereka. Beberapa orang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang politik, tetapi yang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya politik dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi mereka tentang penerapan politik dalam kehidupan sehari-hari dan tujuan jangka panjang mereka juga menentukan tingkat keterlibatan mereka.

Pemilih pemula pada Pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah masih belum memiliki tingkat melek politik yang ideal, menurut pengamatan awal penulis. Adanya beberapa isu yang menjadi penyebabnya: Masih kurangnya literasi politik. Bahkan saat ini, masih ada pemilih pemula yang bingung tentang cara kerja pemilu, hak pilih mereka, dan mengapa penting untuk terlibat dalam pemilu lokal. Rendahnya tingkat literasi politik terkait dengan kurangnya pendidikan politik sejak dini baik di lingkungan formal maupun informal. Akibatnya, banyak orang yang baru pertama kali memilih bingung tentang peran mereka sebagai warga negara dan bagaimana cara menggunakan hak pilih mereka. Hal ini menyebabkan banyak pemilih yang tidak berpengalaman memberikan suara untuk pemimpin daerah tanpa pengetahuan yang memadai, yang menurunkan standar pemilu secara keseluruhan. Bagaimana Orang Mendapatkan Berita Tentang Politik dari Media Sosial. Sebagian besar, media sosial adalah tempat para pemilih pemula mendapatkan berita politik. Mereka bisa saja disesatkan dalam memilih calon kepala daerah karena media sosial sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar, seperti berita hoax. Peran

Konteks Sosial dalam Sikap Politik Pemilih Pemula. Bagi pemilih pemula, faktor sosial seperti teman, keluarga, dan tokoh masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap politik mereka. Banyak pemilih pemula yang tidak melakukan riset terhadap kandidat atau topik yang sedang hangat diperbincangkan; mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh keluarga atau teman mereka.

Studi sebelumnya April 2020, oleh Huzaifa Katarudin. Temuan dari Pilkada Kota Pariaman 2018 tentang Dampak Literasi Politik terhadap Keterlibatan Pemilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi politik memiliki dampak sebesar 31% terhadap partisipasi politik, yang menunjukkan bahwa pemilih pemula pada Pilkada Kota Pariaman 2018 lebih aktif secara politik ketika pengaruh literasi politik lebih kuat. Dan 2017-Nora Eka Putri. Peran Literasi Politik dalam Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu. Variabel y menyumbang 47,05% dari varians dalam variabel x dalam penelitian ini, sisanya 52,95% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

METODE

Teknik kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat literasi politik pemilih pemula terhadap partisipasi mereka dalam pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah. Menurut Kasiram (dikutip dalam Sujarweni, 2022: 39), penelitian kuantitatif adalah jenis pengetahuan yang menganalisis informasi tentang suatu topik dengan menggunakan data numerik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data yang pokok. Sebanyak 1.257 partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMA di Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu, 93 orang dihasilkan setelah sampel dikeluarkan, yang semuanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi sebagai peserta penelitian. Tempat penelitian dilakukan disebut sebagai lokasi penelitian. Lokasi penelitian dapat berupa lingkungan tertentu atau organisasi sosial tertentu. Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, untuk mengumpulkan data primer. Sekolah-sekolah tersebut antara lain MAN 1 HSU, MAN 2 HSU, SMK Negeri 1 Amuntai, SMK Negeri 2 Amuntai, SMK Negeri 3 Amuntai, SMA Negeri 1 Amuntai, dan SMA Negeri 2 Amuntai.

PEMBAHASAN

1. Pengetahuan tentang politik

Pemahaman praktis tentang gagasan yang diambil dari kehidupan dan bahasa umum adalah apa yang dimaksud Bernard Crick ketika dia menyatakan bahwa seseorang melek politik dalam Essays on Citizenship (dalam heryanto 2019). Ini adalah upaya untuk memahami inti dari politik dengan mempelajari ide-ide inti para kandidat dan bagaimana kecenderungan mereka berdampak pada orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Kombinasi dari informasi, kompetensi, dan perspektif membentuk literasi politik. Definisi yang lebih komprehensif tentang literasi politik, menurut Crick, adalah kemampuan untuk membuat suara seseorang didengar dalam kehidupan publik dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab seseorang dalam lingkungan formal dan informal. Menghormati keragaman pendapat dan mengenal hak dan kewajiban demokratis adalah komponen lain dari literasi politik. Untuk berhasil di bidang ini, Anda memerlukan pemahaman yang mendalam tentang politik, tetapi Anda juga perlu

menerima sudut pandang lain, memiliki keterampilan berbicara yang baik, dan tahu bagaimana mengidentifikasi kesamaan di antara kepentingan yang bersaing.

2. Partisipasi

Para ahli dan orang awam sering menggunakan kata "partisipasi" dalam percakapan sehari-hari. Istilah "partisipasi" masih sulit dipahami hingga saat ini. Berbagai sudut pandang yang dipertimbangkan untuk sampai pada suatu kesimpulan atau definisi turut berperan dalam hal ini.

Konsep partisipasi mencakup berbagai aspek penting, seperti yang dinyatakan oleh Sundari 2001 (dikutip dalam Ripandi 2021:13), yaitu:

1) Dalam partisipasi, bukan hanya tindakan berpartisipasi yang dipelajari, tetapi juga aspek mental dan emosional.

2) Memotivasi individu untuk menyumbangkan kemampuannya dalam kelompok dapat dicapai melalui partisipasi, yang pada gilirannya memungkinkan kemampuan berpikir dan inisiatifnya muncul ke permukaan dan diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengatakan bahwa, secara singkat, partisipasi terjadi ketika seorang individu atau kelompok bersedia mengerahkan seluruh kemampuannya dalam suatu tindakan, baik secara mental maupun fisik, dan ikut bertanggung jawab atas hasilnya.

3. Pemilih Pemula

a. Definisi pemilih pemula

Ada tiga jenis pemilih pemula di Indonesia. Pertama, ada pemilih logis. Mereka adalah orang-orang yang memilih partai politik setelah mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dengan cermat. Kedua, ada pemilih yang kritis secara emosional-mereka yang idealis dan tidak mau berkompromi-tetapi tetap memberikan suara. Pasal 1 Ayat (22) UU No. 10/2008 menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia yang sudah kawin atau sudah mencapai usia tujuh belas (17) tahun berhak memilih. Kategori ketiga adalah pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Kemudian, menurut ayat 1 dan 2 Pasal 19 UU No. 10 Tahun 2008, warga negara yang terdaftar pada daftar pemilih tetap oleh penyelenggara pemilu dan pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih (Rachmat 2016).

b. Karakteristik pemilih pemula

Mereka yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya dikenal sebagai pemilih pemula. Tergantung pada batasan nasional, mereka biasanya adalah remaja atau orang dewasa muda yang baru saja mencapai usia pemungutan suara, yang biasanya 17 atau 18 tahun. Beberapa ciri-ciri pemilih pemula adalah sebagai berikut: Mereka biasanya tidak memiliki banyak pengalaman dalam memahami proses pemilu atau politik secara umum karena ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam pemilu. Orang tua, teman, dan media sosial dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keyakinan politik pemilih pemula. Mungkin mereka belum menyerah untuk mencari bukti atau ide yang mendukung

keyakinan mereka. Internet dan media sosial memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada pemilih pemula tentang politik karena mereka adalah bagian dari generasi yang tumbuh dengan teknologi. Oleh karena itu, mereka lebih mudah menerima iklan online dan isu-isu yang viral. Memprioritaskan Keprihatinan Saat Ini: Perubahan iklim, kesetaraan gender, pendidikan, dan pekerjaan adalah beberapa masalah sosial dan lingkungan yang dianggap paling penting oleh pemilih pemula. Pemilih yang baru pertama kali memberikan suara cenderung memiliki sikap politik yang utopis, seperti keinginan untuk perubahan kebijakan yang dapat langsung terlihat. Beberapa pemilih pemula mungkin melihat pemungutan suara sebagai kesempatan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga mereka mungkin akan melakukan proses tersebut dengan sangat antusias. Di sisi lain, beberapa orang mungkin lebih skeptis dan sinis. Namun, sebagian lainnya mungkin berhati-hati untuk terlibat dalam politik karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem dan para wakil rakyat. Meskipun banyak pemilih pemula yang sangat antusias, mereka sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik, proses pemilu, dan bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka.

c. Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu

Karena hasilnya belum bulat, pemilih pemula dianggap sebagai swing voter yang sesungguhnya karena antusiasme mereka yang tinggi. Mereka lebih terpengaruh oleh iklim politik lokal yang terus berubah dibandingkan dengan dorongan ideologi tertentu ketika membuat keputusan politik. Pemilih pemula sangat rentan terhadap pengaruh orang-orang terdekat, termasuk orang tua, kerabat, dan teman. Selain itu, pemilih pemula juga terpengaruh oleh pilihan-pilihan yang disajikan di media. Berita televisi, spanduk, pamflet, poster, dan media serupa lainnya dapat memenuhi tujuan ini. Karena norma-norma budaya mereka yang santai, riang, kasual, dan suka bersenang-senang, para pemilih pemula, terutama remaja (usia 17 tahun ke atas), lebih memilih untuk menghindari apa pun yang tidak menghibur. Remaja membutuhkan lingkaran pertemanan mereka sendiri karena alasan sederhana, selain untuk bersenang-senang, kelompok teman sebaya adalah bagian terpenting dari masa remaja.

Di era media digital seperti media sosial ini, akan sangat menguntungkan jika Anda mengetahui siapa yang memilih untuk pertama kalinya dan bagaimana cara mendekati mereka. Jika digunakan secara efektif, media sosial dapat menarik suara pertama kali. Inisiatif media sosial diyakini dapat menjadi penghubung dengan memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Telegram.

Kurangnya pemahaman dan keterlibatan politik merupakan hasil dari tindakan pemilih pemula, yang sering kali ditandai dengan kenaifan dan ketidakstabilan dalam kaitannya dengan lingkungan politik. Program pendidikan dan sosialisasi pemilih bertujuan untuk mendorong pemilih pemula untuk memberikan suara dalam pemilu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diselenggarakan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemungutan suara merupakan cara bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya, dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan transparan.

4. Pemilukada

Sebagai tanda membaiknya demokrasi di Indonesia, era reformasi memperkenalkan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung. Hal ini memberikan masyarakat lebih banyak suara dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka secara politik.

Selain itu, para pemimpin yang dipilih oleh masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu lokal, dan itulah sebabnya mengapa pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mempromosikan otonomi di tingkat daerah.

Assiddiqie berpendapat (dalam Wirdasari 2015: 25) bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan cara yang demokratis untuk memilih pemimpin daerah karena memungkinkan masyarakat untuk secara bebas dan adil memilih kandidat yang bermain dengan aturan yang sama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah yang tidak mengizinkan warganya untuk secara bebas memilih pemimpin mereka tidak dapat benar-benar demokratis, terlepas dari sejauh mana pemerintahan mereka disusun untuk mempromosikan demokrasi. Kualitas proses pemilihan umum di suatu negara telah lama dianggap sebagai indikasi tingkat demokrasinya. Apakah warga negara memilih pejabat pemerintah mereka atau tidak hanyalah salah satu ukuran demokrasi. Pemilihan kepala daerah, menurut Suharizal dalam Wirdasarı (2015: 25-26), adalah proses politik yang kompleks yang ditandai dengan konflik antara kepentingan penguasa dan kehendak rakyat, serta kepentingan nasional dan internasional.

Penelitian ini dilakukan di sekolah menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, mulai Kamis, 21 November 2024 hingga Selasa, 22 November 2024. Sejak kuesioner disebarkan, pengumpulan data berlangsung selama kurang lebih 2 hari. Pada saat penelitian, peneliti membagikan kuesioner dan langsung meminta siswa kelas 12 untuk mengisinya. Namun, tampaknya pendekatan ini tidak efektif karena beberapa sekolah sedang dalam masa ujian semester, dan beberapa sekolah lainnya sedang melaksanakan PKL, sehingga mereka meminta waktu tambahan untuk mengisi survei yang memakan waktu dua hari. Untuk memastikan bahwa siswa bersedia mengisi kuesioner, peneliti memutuskan untuk membagi kuesioner dan meninggalkannya untuk diisi keesokan harinya. Karena kesibukan para responden, sangat sulit untuk bertemu dengan mereka secara langsung, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan try out. Terdapat total 48 pernyataan; setelah dilakukan pengujian dan analisis data, 25 pernyataan dipertahankan dan 23 pernyataan dibatalkan.

Setelah mengumpulkan data penelitian, data tersebut ditinjau dan dinilai. Hasil dari analisis deskriptif pertama didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh 93 peserta. Data deskriptif menunjukkan bahwa, rata-rata, literasi politik subjek penelitian sedikit lebih rendah daripada skor teoritis. Secara spesifik, rata-rata empiris literasi politik adalah 21,9 dengan standar deviasi 3,22, lebih rendah dari rata-rata hipotetis literasi politik yaitu 27,5 dengan standar deviasi 5,5.

Subjek penelitian secara umum memiliki skor keterlibatan masyarakat yang lebih rendah dibandingkan dengan skor partisipasi masyarakat secara teoritis, karena rata-rata empiris (M = 40,5 dan SD = 2,46) lebih rendah dari rata-rata konseptual (M = 35 dan SD = 7).

Dua uji - korelasi Pearson product moment dan uji asumsi klasik - digunakan dalam penyelidikan ini. Untuk mengetahui apakah data tersebut dapat digunakan, peneliti menjalankannya melalui uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Berdasarkan analisis data, kita dapat melihat bahwa terdapat hubungan yang rendah namun signifikan secara statistik antara literasi politik dan keterlibatan masyarakat; nilai korelasi antara kedua variabel tersebut adalah 0,378, dan tingkat signifikansinya adalah 0,00. Sugiyono 2015: 184 (dikutip dalam Ghaida 2024: 98) memberikan bukti tentang hal ini: 0,00-0,199 berada di bagian paling bawah skala, 0,20-0,399 berada di tengah, 0,40-0,599 berada di bagian paling atas, 0,60-0,799 berada di tengah-tengah skala,

dan 0,80-1,00 berada di bagian paling atas. Angka -0,378 berada di kisaran rendah 0,20 hingga 0,399. Menurut data, pemilih pemula di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat tidak mungkin berpartisipasi dalam pilkada berdasarkan tingkat literasi politik mereka.

Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, perhitungan uji T menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 3,900 lebih tinggi dari ttabel (df-N-1 untuk N=92) yaitu 1,66159. Dengan demikian, variabel Tingkat Melek Politik berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat, H.a diterima dan H.0 ditolak karena thitung > ttabel dan nilai signifikansi < 0,05.

Hal ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, bahwa pemilih pemula masih memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah. Mereka masih harus menempuh jalan panjang untuk memahami proses pemilu, hak pilih, dan pentingnya terlibat dalam pemilu. Rendahnya tingkat melek politik dikaitkan dengan kurangnya pendidikan politik sejak dini, baik di lingkungan formal maupun informal. Akibatnya, banyak orang yang baru pertama kali memilih bingung tentang peran mereka sebagai warga negara dan bagaimana cara menggunakan hak pilih mereka. Hal ini menyebabkan banyak pemilih yang tidak berpengalaman memberikan suara untuk pemimpin daerah tanpa pengetahuan yang memadai, yang menurunkan standar pemilu secara keseluruhan.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara persentase dari variabel tingkat melek politik terhadap variabel keterlibatan masyarakat, digunakan uji koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 14,3%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini menjelaskan 85,7% dari varians keterlibatan masyarakat, sedangkan variabel tingkat melek politik menjelaskan 14,3%.

Tingkat melek politik yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi, karena kedua variabel tersebut berhubungan positif dan menuju ke arah yang sama. Kebalikannya juga benar: literasi politik yang lebih rendah dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat yang lebih rendah.

Selain itu, studi yang meneliti hubungan antara literasi politik dan keterlibatan masyarakat telah menemukan hubungan yang menguntungkan dan signifikan secara statistik. Dengan demikian, dengan adanya korelasi positif antara tingkat melek politik dan keterlibatan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tingkat melek politik yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena warga negara yang memiliki literasi politik memiliki informasi yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka, termasuk kemampuan untuk memberikan suara dalam pemilu yang demokratis. Semakin banyak mereka belajar tentang politik, semakin banyak investasi yang mereka dapatkan karena mereka percaya bahwa suara mereka dapat membuat perbedaan. Penduduk yang terdidik secara politik juga lebih cenderung memiliki keyakinan terhadap keberhasilan pemerintah dan potensi upaya individu untuk melakukan perubahan positif. Karena alasan ini, mereka terlibat dalam politik dengan harapan dapat mempengaruhi kebijakan yang akan memperbaiki situasi sosial mereka.

Nilai R Squared yang mengukur sumbangan efektif variabel tingkat melek politik terhadap keterlibatan masyarakat adalah sebesar 0,143, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai uji koefisien determinasi (R Square).

SIMPULAN

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada dipengaruhi oleh tingkat melek politik. Hasil penelitian menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,378 pada tingkat signifikansi 0,00, menunjukkan hubungan yang rendah namun sangat signifikan antara kedua variabel. Nilai 0,378 berada pada angka 0,20 - 0,599 yang termasuk kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel, Tingkat Melek Politik (X) dan Partisipasi Masyarakat (Y), berkorelasi secara signifikan dan saling mempengaruhi secara positif. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, nilai thitung sebesar 3,900 lebih tinggi dari nilai ttabel (df-N-1 untuk N=92) sebesar 1,66159. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Melek Politik berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat (H.a.) diterima dan hipotesis nol (H.0) ditolak, karena nilai t-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung lebih besar dari t-tabel. Kami menemukan bahwa tingkat melek politik memiliki dampak substansial terhadap kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam komunitas mereka, dan kami menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh tersebut.

Penduduk di Kecamatan Hulu Sungai Utara tidak terlalu melek politik, yang mungkin menjelaskan mengapa mereka tidak memberikan suara dalam pilkada baru-baru ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dari 93 responden dengan menggunakan SPSS 22, didapatkan nilai korelasi (R) dengan kategori rendah yaitu 0,378. Nilai uji koefisien determinasi (R Square) menghasilkan nilai sebesar 0,143, menunjukkan bahwa variabel Tingkat Literasi Politik memberikan sumbangan efektif sebesar 14,3% terhadap variabel Partisipasi Masyarakat. Sisanya sebesar 85,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Assiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI

Aziz Turinda. 2009. Pengertian Partisipasi. Diakses dari : http://turindaatp.blogspot.co.id/2009/06/pengertian.html, pada tgl 22 Agustus 2024

Budiardjo, Mariam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Dr. Abdul Chalik, Survey Tingkat Melek Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik tahun 2015

Dr. Gun Gun Heryanto. . Strategi Literasi Politik. Yogyakarta : IRCiSoD 2021

Ghaida Leony, 2023 Pengaruh Penerapan Absensi Daring (online)Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Huzaifa Katarudin, 2018. Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018.

Novi Quintena, 2018. Melek Politik (Political Literacy) Pemilih Pemula Pada Pemilukada Serentak 15 Februari 2017 Di Kota Lhoksuemawe.

Nora Eka Putri, 2017. Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu.

M, Asfar. (2006). Pemilu dan Perilaku Pemilih (1995-2004). Surabaya : pustaka

uereka danPusdeHAM, 2006

Penyusun, T, (2019). Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1(S1). Amuntai: STIA Amuntai

Reno Affrian, 2018. Fenomena Melek (POLITICAL LITERACY) Masyarakat Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sugiyanto, Tri dan Supriyanto, Agus. (2019). Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2015. Metede Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta